

ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

AMRYZA MUFIDAH

NIM : 31402000027

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

Lembar Pengesahan Skripsi

**ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022)

Disusun Oleh:

Amryza Mufidah

NIM : 31402000027

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan

sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 15 Juli 2024

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIK. 211489001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022)

Disusun Oleh:

Amryza Mufidah

NIM : 31402000027

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 25 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Sutapa, S.E., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496007

Dian Essa Nugrahini, S.E., M.Ak., Ak
NIK. 211421031

Pembimbing

Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA
NIK. 211489001

Skripsi telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 25 Juli 2024

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 210493033

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amryza Mufidah

NIM : 31402000027

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022)** merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada plagiat karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat pada penelitian ini telah dikutip sesuai dengan kode etik ilmiah. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 4 Agustus 2024



Amryza Mufidah

3140200027

INTISARI

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas, dimana penilaian terhadap pengukuran kinerja keuangan saat ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan hasil pada program selanjutnya. Pengukuran kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai keluaran yang didapat setelah melaksanakan proses atau aktivitas.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Pada hal ini *stewardship* menekankan bahwa manajer atau pemimpin harus memiliki orientasi yang proaktif, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mengelola aset dan sumber daya organisasi dengan hati-hati serta efektif seolah-olah mereka adalah “pengelola amanah” dari masyarakat sebagai prioritas utama atau pemangku kepentingan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik.

Penelitian ini mempunyai lima hipotesis yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit BPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 14 Kabupaten dan 1 Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2022 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Periode 2018 - 2022 yang diperoleh melalui *website* Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit BPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian internal, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan audit BPK, dan sumber lainnya yang relevan dalam periode waktu 2018-2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga didapat sebanyak 70 data. Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemakmuran dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan, dan opini audit BPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Sistem Pengendalian Internal, Opini audit BPK, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of local government size, prosperity, intergovernmental revenue, internal control systems, and BPK audit opinions on the financial performance of local governments in Central Kalimantan Province.

This research employs a descriptive quantitative approach, utilizing secondary data obtained from local government financial reports, BPK audit reports, and other relevant sources over the period 2018-2022. The sample size of this study includes 14 regencies/cities in Central Kalimantan Province, resulting in a total of 70 data points. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis.

The hypothesis testing results indicate that prosperity and intergovernmental revenue have a significant positive effect, local government size has a significant negative effect, internal control systems have a negative but not significant effect, and BPK audit opinions have a positive but not significant effect on the financial performance of local governments.

Keywords: Local Government Size, Prosperity, Intergovernmental Revenue, Internal Control Systems, BPK Audit Opinion, Financial Performance of Local Governments

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan pra skripsi yang berjudul **“ANALISIS DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022).

Penyusunan pra skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan pra skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya pra skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. Kiryanto, S.E., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., Ca selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi.
6. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.

7. Bapak Hariyanto, Ibu Aslamiyah, dan Adek Muhammad Hanif Alfariz selaku keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
8. Teman-teman Akuntansi tahun 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan pra skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 15 Juli 2024

Penulis



Amryza Mufidah



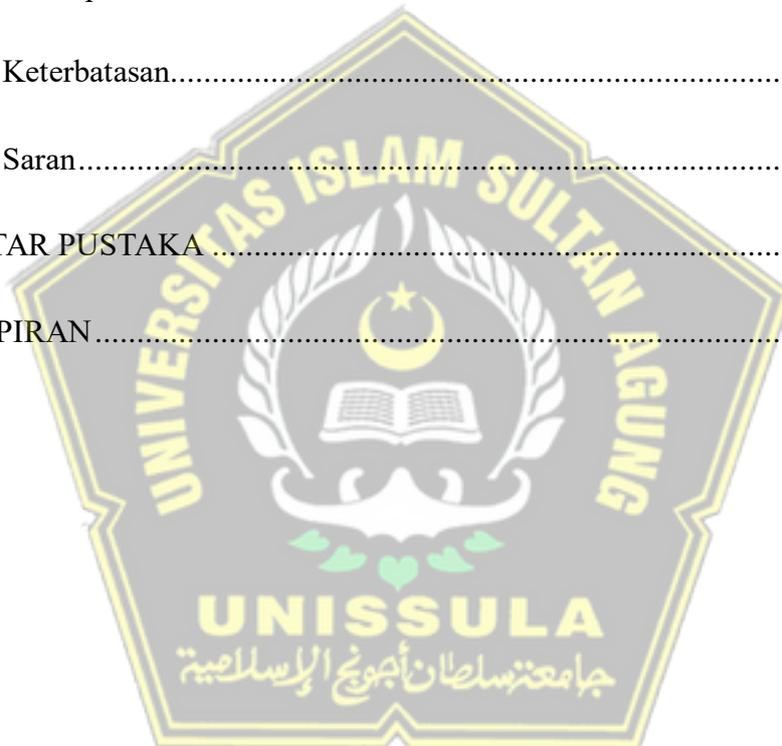
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
INTISARI	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Grand Theory</i>	10
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>).....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah	13
2.1.4 Kemakmuran	14
2.1.4 <i>Intergovernmental Revenue</i>	15
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal	16

2.1.6 Opini Audit BPK	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis & Pengembangan Hipotesis	21
2.3.1 Pengembangan Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	28
3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	29
3.6 Teknik Analisis Data	31
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.6.3 Model Regresi Linear Berganda	33
3.6.4 Uji Kelayakan Model.....	34
3.6.5 Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t)	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37

4.2 Analisis Data.....	37
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1 Uji Normalitas	42
4.3.2 Uji Autokorelasi.....	43
4.3.3 Uji Multikolinearitas.....	44
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
4.5 Uji Kelayakan Model	49
4.5.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan).....	49
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.6 Pengujian Hipotesis.....	50
4.6.1 Uji Statistik (Uji t).....	50
4.7 Pembahasan	53
4.7.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	53
4.7.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	54
4.7.3 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	56

4.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	58
4.7.5 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Keterbatasan.....	62
5.3 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Efektivitas PAD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Temuan Terbesar 5 SPI.....	40
Tabel 4.3 Distribusi Opini Audit BPK.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Linier Berganda.....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	50
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang melibatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah menghadirkan konteks kinerja yang mencakup dua perspektif berbeda. Di mana sisi pertama, pemerintah mempunyai kewenangan yang begitu besar atas daerahnya. Sedangkan sisi kedua kesiapan pemerintah daerah dalam mendapatkan Aturan yang wajib dilakukan pemerintah salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas terkait kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tuntutan dari masyarakat (Umum et al., 2019).

Penelitian Gultom et al., (2020) mengatakan otonomi daerah merujuk pada sistem di mana pemerintahan lokal atau daerah memiliki otoritas dan kekuasaan yang relatif mandiri dalam mengelola urusan mereka sendiri. Prinsip dasar otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola sebagian besar aspek kehidupan mereka sendiri, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebijakan publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan dan pertanggung jawaban secara lebih merata di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat dengan lebih efektif.

Penegasan kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk secara mandiri menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang

dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004. Dengan menerapkan otonomi daerah tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih bisa memahami keadaan dan permasalahan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, tujuan pemerintah daerah adalah mengelola keuangan daerah secara efektif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin kelancaran dan pemerataan pembangunan dan pemberian pelayanan. Hal ini memerlukan pembentukan kerangka sistematis pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja untuk menilai kemajuan pemerintah daerah (Rofiq & Arza 2021).

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 menandakan adanya perkembangan signifikan dalam bidang pemerintahan daerah, karena memberikan otonomi dan tanggung jawab yang luas kepada kabupaten/kota. Kewenangan baru ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memodernisasi sistem administrasi perekonomiannya. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan efektif terhadap perekonomian daerah dengan melaksanakan berbagai program dan upaya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun secara mandiri. Anggaran ini menjadi landasan bagi kegiatan administrasi di daerah masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan menetapkan keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki banyak kegunaan. Laporan-laporan ini memungkinkan dilakukannya perbandingan kinerja keuangan terhadap anggaran, penilaian

kondisi dan hasil operasional, penentuan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan keuangan, evaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, dan bantuan dalam memberikan gambaran kinerja yang transparan. untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas masyarakat. Untuk mengukur kinerja keuangan, Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan PAD sesuai target (Mahmudi et al., 2019). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Tabel 1.1

Rasio Efektivitas PAD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Kinerja Keuangan
1	2018	2.806,4 M	2.884,5 M	102,78%
2	2019	3.030,24 M	3.212,11 M	106%
3	2020	3.527,94 M	2.944,17 M	83,47%
4	2021	3.295,57 M	3.931,79 M	119,31%
5	2022	4.378,41 M	2.938,59 M	67,12%

Kinerja yang baik atau efektif mempunyai target persentase kinerja 100% sebaliknya jika persentase dibawah 100% maka kinerja belum efektif (Yulinchton et al., 2022). Berdasarkan tabel diatas Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 dan 2022 dimana kinerja yang baik atau efektif mempunyai target persentase kinerja 100%, dikutip dari berita mmc.kalteng.go.id menyatakan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Tengah pada rasio efektivitasnya mengalami penurunan yang drastis yang diakibatkan oleh maka

dari itu pemerintah mengharapkan agar nantinya dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya serta mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi pada tahun tahun selanjutnya. Selain itu agar penggunaan alokasi dapat lebih efektif dan dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Jika PAD tidak terealisasi dengan baik, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Hal ini bisa membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat (Hinaya et al., 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diamati pada setiap daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, yang paling signifikan adalah karakteristik daerah sebagai variabel yang menjadi pedoman analisis kinerja. Karakteristik pemerintah daerah salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2018) Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Sesuai dengan ukuran pemerintahan, jika pemerintahannya besar maka akan menawarkan beberapa jaminan operasional yang nantinya akan membuat pemberian pelayanan kepada masyarakat umum menjadi lebih mudah (Mega dkk 2019).

Temuan Natoen dkk. (2019) menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal ini sejalan dengan penelitian Kirana (2020) yang juga menegaskan adanya pengaruh positif besaran pemerintah

daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Namun hasilnya berbeda dengan penelitian Ramadana & Bahgia (2023) dan Anggraini dkk. (2019), yang menemukan hasil negatif yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan tidak mempengaruhi kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel selanjutnya yaitu Kemakmuran Pemerintah Daerah yang dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut pendapat Rizki (2017). UU 4 No.33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah sumber pendapatan asli dari daerah yang digali di daerah tersebut untuk dijadikan modal dasar pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan upaya daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat. Menurut penelitian Lim dkk (2019), kemakmuran berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Arta Pradana et al., (2022) yang menyatakan bahwa kemakmuran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Bertolak belakang dengan penelitian Mega yang dilakukan pada (2019), Kemakmuran Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

Menurut Nugroho (2018), variabel pendapatan antar pemerintah (*Intergovernmental revenue*) mengacu pada pendapatan yang diperoleh dari sumber eksternal dan transfer keuntungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pendapatan ini biasa juga disebut dengan pendapatan perimeter atau dana perimbangan. Nugroho (2018) berpendapat bahwa Pendapatan Antar Pemerintah berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena memungkinkan pemerintah daerah kabupaten/kota memaksimalkan penggunaan

dana transfer pusat. Namun penelitian Nurfika (2019) membantah temuan tersebut, yang menyatakan bahwa Pendapatan Antar Pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arta Pradana dkk. (2022) yang juga menyimpulkan bahwa Pendapatan Antar Pemerintah tidak berdampak secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern (SPI) Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Mencakup struktur organisasi dan berbagai metode serta alat yang digunakan perusahaan untuk menjaga asetnya serta menjaga keakuratan dan integritas sistem kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, seperti yang diuraikan oleh Yuhanis (2019: 543). Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik memainkan peran penting dalam membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka secara efektif (Adinula & Efendi 2022). Penelitian yang dilakukan Welly (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berbeda dengan Penelitian M.Firza (2018) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta Pradana et al., (2022) , yang menunjukkan bahwa hasil sistem pengendalian internal hanya berkontribusi sebagian terhadap kinerja keuangan.

Variabel yang terakhir pada penelitian ini yaitu opini audit, opini audit BPK menurut UU no. 15 Tahun 2004 adalah “Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”. Situs milik BPK RI yaitu www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi, menuliskan bahwa opini yang diberikan auditor dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan opini tidak memberikan pendapat (TMP). Opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan investor mengenai kinerja keuangan pemerintah.

Dalam penelitian Mega (2019) disimpulkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun pada penelitian Kirana (2020) mengalami perbedaan hasil yang disimpulkan bahwa opini audit BPK memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara negatif signifikan.

Dalam penelitian terdahulu, terjadi ketidakseragaman hasil mengenai pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai hal tersebut untuk mencari tahu kebenarannya dan sekaligus sebagai landasan teoritis bagi peneliti dalam mencari *research gap* dari penelitian penelitian di atas. Penelitian ini merujuk pada penelitian Arta Pradana et al., (2022) yang menguji Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel berupa opini audit BPK, serta daerah dan tahun pengamatan yang

berbeda, dengan pengambilan sampel pada daerah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan rentan tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang melandasi penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Bagaimana pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan tentang Karakteristik Pemerintah Daerah yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, serta dapat mengembangkan literatur literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar daerah lebih maju dan Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory bermula dari perspektif pemikiran akuntansi yang banyak didasari oleh teori-teori psikologi dan sosiologi (Donaldson, 1991). *Stewardship Theory* adalah pandangan dalam manajemen yang menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan perhatian terhadap aset dan sumber daya organisasi. Konsep ini melibatkan pemahaman bahwa manajer atau pemimpin bertindak sebagai pengawas (*steward*) atas aset dan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, dan mereka harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik untuk kepentingan organisasi (Anton, 2010). Teori ini memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama bukan kepentingan individu semata.

Teori *stewardship* menekankan bahwa manajer atau pemimpin harus memiliki orientasi yang proaktif, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mengelola aset dan sumber daya organisasi dengan hati-hati serta efektif seolah-olah mereka adalah “pengelola amanah” dari masyarakat sebagai prioritas utama atau pemangku kepentingan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui efisiensi bisnis, sehingga fungsi utilitas menjadi maksimal (Olson & Wu 2015).

Keterkaitan antara teori *stewardship* dalam penelitian ini ialah untuk dapat menguraikan bagaimana peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakatnya, menampung aspirasi masyarakat demi terwujudnya keberhasilan organisasi, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diberikan. Dalam pertanggungjawaban tersebut peran *stewards* yaitu sebagai manajer serta pengaudit internal untuk dapat mengatur keefektifan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Teori ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya, dan wewenang. Para pemimpin diharapkan menjaga integritas dan mencegah tindakan korupsi atau penyalahgunaan lainnya. *Stewardship* memandang pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan agar menciptakan hubungan yang lebih baik antara organisasi dan masyarakat (Dinah 2023).

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabandan pengawasan keuangan daerah (pasal 1 ayat 8).

Menurut Kirana (2020) Pengukuran kinerja keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas, dimana penilaian terhadap pengukuran kinerja keuangan saat ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan hasil pada program selanjutnya. Pengukuran kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai keluaran yang didapat setelah melaksanakan proses atau aktivitas. Menurut Ramadana & Bahgia (2023) Kinerja keuangan merupakan hasil tindakan dan program yang dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan politik atau hukum. Semakin tinggi rasio keefektifan PAD nya maka semakin bagus pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Maka dari itu rumus dari variabel keuangan kinerja pemerintah daerah berdasarkan penelitian Rahma Putri & Amanah (2020) yaitu :

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah =	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
---	---

2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Dimensi pemerintah daerah mencakup salah satu ciri khasnya. Besaran suatu wilayah dapat menunjukkan luas wilayah geografisnya atau berfungsi sebagai indikator keadaan badan pemerintahannya. Sebagaimana dikemukakan Nugroho (2018), besar kecilnya suatu pemerintahan daerah menunjukkan skala struktur organisasinya. (Pradana dkk. 2022) menegaskan bahwa ukuran pemerintahan daerah yang lebih besar dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional pemerintahan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, peningkatan total aset berhubungan dengan peningkatan kinerja keuangan secara proporsional.

Dalam penelitian (Pradana et al., 2022) menggunakan total berupa aset lancar dan aset tetap yang memiliki potensi untuk memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Aset lancar, seperti pajak dan retribusi, dapat secara langsung meningkatkan pendapatan daerah, sementara likuiditas yang tinggi dari aset lancar, seperti kas dan setara kas, memberikan fleksibilitas dalam mengelola kebutuhan keuangan sehari-hari. Di sisi lain, aset tetap, seperti infrastruktur, memiliki peran strategis dalam pembangunan jangka panjang, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian Ramadana & Bahgia (2023) mengatakan size daerah dapat dihitung menggunakan jumlah total asetnya, penggunaan penelitiannya adalah logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Dengan demikian, untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di logaritma natural (Ln). Maka variabel ukuran daerah dapat dirumuskan :

$$\text{Size Daerah} = \text{Ln} (\text{Jumlah Aset})$$

2.1.4 Kemakmuran

Menurut penelitian Pradana et al., (2022) Kemakmuran merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya, kemakmuran suatu daerah dapat diukur berdasarkan pendapatan asli daerahnya atau (PAD). Penelitian Fassa (2018) juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan atau kemakmuran daerah tercermin dari peningkatan pendapatan primer daerah. PAD sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah tersendiri, dan PAD lain yang sah (Rahma Putri & Amanah, 2020).

(UU No. 33 Tahun 2004) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh suatu daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. untuk mendanai pelaksanaan. Sesuai dengan potensi pelaksanaan daerah,

otonomi daerah yang merupakan wujud desentralisasi dan kesejahteraan dipandang akan mempengaruhi kinerja fiskal pemerintah daerah, yang dapat dilihat pada pendapatan primer bruto (PAD) daerah dibagi dengan total pendapatan yang diperoleh dari daerahnya, semakin makmur daerah tersebut maka semakin bagus pula kinerja keuangan pemerintahannya. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian kemakmuran :

$$\text{Kemakmuran} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.4 *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental Revenue yang biasa disebut dengan dana perimbangan merupakan sejumlah transfer dana dari pemerintah pusat yang dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nugroho 2018). Pendapatan antar pemerintah adalah bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan ketergantungan pemerintah daerah yang lebih besar pada transfer fiskal pusat. Pendapatan antar pemerintah merupakan biaya yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan daerah guna mencapai tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik (B. I. Sari & Wati 2021).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”. Perimbangan fiskal antara Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sistem alokasi fiskal yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dengan mempertimbangkan

potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta jumlah dana untuk melaksanakan desentralisasi dan bantuan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan bantuan Tugas. Semakin tinggi *Intergovernmental Revenue* pada daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah pusat.

Dana perimbangan ini meliputi Dana Bagi Hasil (dari pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Maka *Intergovernmental Revenue* berdasarkan penelitian Rahma Putri & Amanah (2020) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IR = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tiga rangkaian tujuan, yaitu: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasional (Nurarifah et al., 2023). Sistem pengendalian internal adalah rencana yang mencakup struktur organisasi dan semua metode dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk menjaga keamanan properti perusahaan, memverifikasi keakuratan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan dan meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap yang ditetapkan (Rahma Putri & Amanah 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu suatu sistem pengendalian yang dilaksanakan sepenuhnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut penelitian Aafiah Millenia (2022) sistem pengendalian internal menggunakan jumlah temuan SPI sebagai indikatornya. Semakin rendah jumlah kelemahan SPI yang ditemukan maka semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Hal ini dapat diukur dari banyaknya kekurangan sistem pengendalian internal yang ditemukan pada LHP yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektivitas penelitian sistem pengendalian internal. Penelitian Kirana menjadi dasar penelitian ini (2020).

2.1.6 Opini Audit BPK

Opini audit merupakan suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Dimana opini ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Rasyid et al., 2022). Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Ditasari & Sudrajat 2020).

Opini BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Penelitian berupa pendapat yang akan disampaikan oleh auditor. BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yaitu semakin baik opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Pradana et al., (2022)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan)	Independen : Ukuran pemerintah, <i>Intergovernmental revenue</i> , Kemakmuran, Sistem pengendalian internal Dependen : Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ukuran pemerintah, <i>Intergovernmental revenue</i> , dan Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Kirana, (2020)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018)	Independen : Ukuran pemerintah, <i>Intergovernmental revenue</i> , Kemakmuran, Opini audit Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ukuran pemerintah dan <i>Intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kemakmuran dan Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3.	Lim et al., (2019)	Pengaruh <i>Size, Wealth, Intergovernmental Revenue</i> dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Independen : <i>Size, Wealth, Intergovernmental Revenue</i> dan Belanja Modal Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Size, Wealth, Intergovernmental Revenue</i> dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
4.	Nurfika (2018)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,	Independen : Ukuran Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran

		<i>Intergovernmental Revenue</i> , Ukuran Legislatif Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara	Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Ukuran Legislatif, Opini Audit Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Ukuran Legislatif dan Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
5.	Safrida Hanum et al., (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan	Independen : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
6.	Rizki Hamdani (2017)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di 90 Indonesia	Independen : Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat, Temuan Audit BPK Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat, Temuan Audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

7.	Marisa Nadya Fasya (2018)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen : Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, <i>Leverage</i> , dan Belanja Daerah Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemakmuran dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
----	---------------------------	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis & Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengembangan Hipotesis

2.3.1.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah adalah ukuran pemerintahannya. Ukuran pemerintah dapat digambarkan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Semakin banyak aset yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar ukuran pemerintahannya. Dalam kasus pemerintah daerah berskala besar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas, karena pemerintah

daerah berskala besar juga memiliki risiko penyalahgunaan yang besar. Menurut konsep teori stewardship menekankan bahwa manajer atau pemimpin yang efektif harus mampu mengelola kompleksitas ini dengan mengutamakan kepentingan pemilik atau stakeholders, dalam pemerintahan yang lebih besar maka tanggung jawab manajer atau pemimpin juga semakin besar (Asnida et al., 2021).

Penelitian milik Kirana (2020) mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Lim et al., (2019) dan Nurfika (2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sehingga dari uraian di atas dapat dibuat hipotesis penelitian untuk menguji kembali pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas dapat dipaparkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.1.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu kemakmuran. Menurut Lim dkk (2019) Kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan kemakmuran pemerintah daerah dapat diukur melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pengaruh kemakmuran terhadap kinerja keuangan

pemerintah dapat didukung oleh teori *stewardship* yang menekankan tentang pentingnya penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam konteks kemakmuran daerah, hal ini dapat mencakup pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, masyarakat, dan perekonomian suatu daerah. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang serta kemakmuran daerah. Biasanya daerah yang lebih makmur cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi sehingga lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk diinvestasikan kepada masyarakat maka dari itu kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Penelitian Aulia (2017) dan Lim dkk (2019) menyatakan bahwa kemakmuran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan penelitian milik Pradana et al., (2022) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut:

H2 : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.1.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori *stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. *Intergovernmental revenue* yang diterima oleh suatu entitas pemerintah harus digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif untuk

mendukung kepentingan publik, mereka harus menjalankan fungsi *stewardship* dengan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang memberikan dana (Suwarno et al., 2023).

Semakin besar jumlah penerimaan transfer fiskal pusat, maka semakin banyak pula dana yang dapat diperoleh untuk mendanai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, sehingga menjadikan kinerja fiskal pemerintah daerah semakin baik.

Penelitian Tatas dkk (2018) dan Lim dkk (2019) mendapatkan hasil bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.1.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa transaksi keuangan, kegiatan operasional, dan kebijakan organisasi dipatuhi, sejalan dengan konsep pertanggungjawaban dalam teori *stewardship*, di mana pihak yang bertanggung jawab atas sumber daya diorganisasi diharapkan untuk bertanggung jawab dan akuntabel atas tindakan dan keputusan mereka (Asnida et al., 2021). Sistem pengendalian intern diukur dengan jumlah temuan SPI sebagai indikator

(Dewi 2020). Semakin sedikit jumlah temuan kelemahan SPI, semakin baik kinerja keuangan suatu daerah.

Penelitian Safrida (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welly (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

H4 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.1.5 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

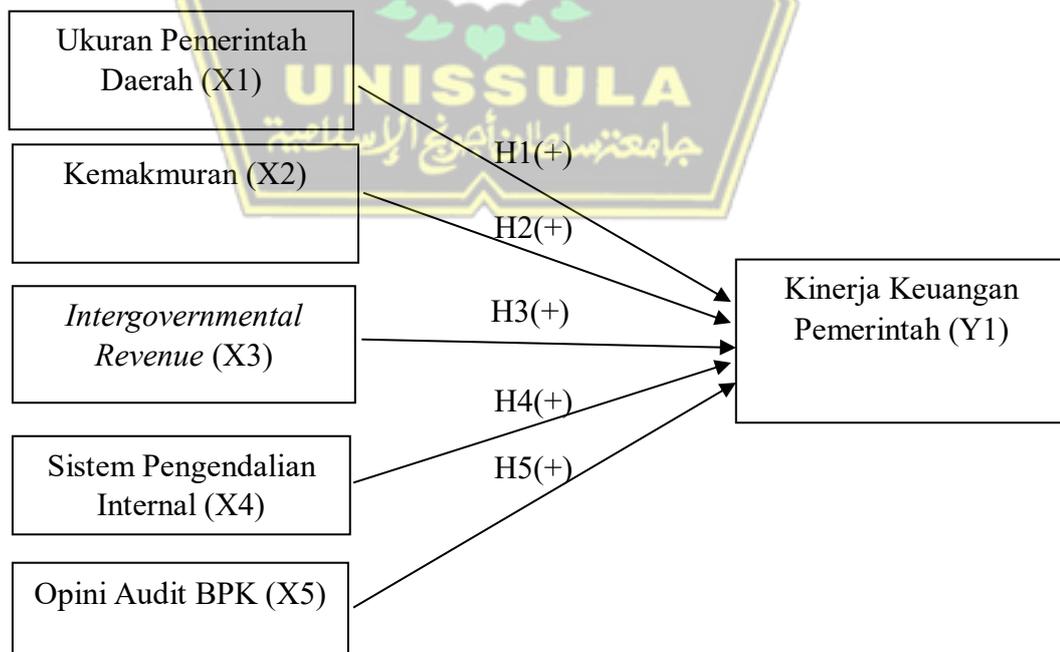
Opini audit BPK juga memainkan peran dalam memperkuat pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam teori *stewardship*. Ketika laporan keuangan dinilai oleh auditor, hal ini dapat membantu memastikan bahwa manajemen telah bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Hal ini juga konsisten dengan nilai-nilai teori *stewardship* yang menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam mengelola sumber daya organisasi. Opini audit BPK memiliki dampak yang signifikan terhadap kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini yang baik atau positif dari BPK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik dan transparan.

Penelitian milik Budianto (2012) dan Sijabat (2016) mengemukakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijaya et al., (2016) yang menyatakan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil-hasil riset tersebut, maka hipotesis terakhir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5: Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Kerangka Penelitian

Kerangka Pemikiran berkaitan dengan hubungan anatara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tercipta kerangka pemikiran sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian terhadap variabel-variabel yang diterjemahkan dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori, menurut Sari et al., (2022) penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018- 2022 yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bagian daripada populasi disebut sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi sehingga penelitian ini menggunakan metode sensus.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisa berupa angka- angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Sumber data pada penelitian merupakan data sekunder. Definisi daripada data sekunder itu sendiri merupakan data yang sudah jadi yang diperoleh peneliti melalui perantara atau orang lain berupa angka.

Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 14 Kabupaten dan 1 Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018- 2022 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I & II Periode 2018 - 2022 yang diperoleh melalui *website* Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini dikenal dengan metode dokumentasi. Data yang berasal dari data sekunder dicatat, dikumpulkan, dan diolah oleh peneliti. Data kajian meliputi laporan realisasi anggaran untuk menentukan nilai dana saldo, PAD, realisasi lengkap anggaran pendapatan, serta neraca untuk menentukan total asset, serta terkait Sistem Pengendalian Intern dan Opini Audit BPK didapat dari *website* BPK perwakilan Kalimantan Tengah.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel didefinisikan sebagai suatu subyek yang memiliki ragam yang berbeda antar obyek (Ulfa 2021). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen didefinisikan sebagai variabel terikat yang besarnya tergantung dari variabel lain atau variabel yang perubahannya disebabkan oleh variabel lain. Variabel independen didefinisikan sebagai variabel yang apabila muncul dapat mempengaruhi variabel lainnya dalam hal ini yakni variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan (variabel dependen)
2. Ukuran Pemerintah Daerah (variabel independen)
3. Kemakmuran (variabel independen)
4. *Intergovernmental Revenue* (variabel independen)
5. Sistem Pengendalian Internal (variabel independen)
6. Opini Audit BPK (variabel independen)

3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

NO	Variabel	Definisi	Rumus
1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurut (Handayani, 2019) adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.	Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$
2.	Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu daerah (Rofiq & Arza, 2021)	Siza Daerah = $\text{Log } n (\text{Aset})$ (Rahma Putri & Amanah, 2020)
3.	Kemakmuarn	Kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan dari daerah tersebut (Tahir et al., 2019) Untuk menilai tinggi rendahnya rasio	Kemakmuran = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$

		kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut : 0%-25% Rendah Sekali 25%-50% Rendah 50%-75% Sedang 75%-100% Tinggi	(Anggraini et al., 2019)
4.	<i>Intergovernmental Revenue</i>	Menurut (UU No. 33 Tahun 2004), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat beberapa kriteria untuk menilai tinggi rendahnya tingkat ketergantungan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004), 0%-25% Rendah Sekali 25%-50% Rendah 50%-75% Sedang 75%-100% Tinggi	$IR = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$ (Nugroho, 2018)
5.	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem Pengendalian Internal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemerintahan secara terus menerus dengan efektif, efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan taat kepada peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan (Pradana et al., 2022)	(SPI) = Jumlah Temuan Kelemahan SPI (Utami & Sulardi, 2020)
6.	Opini Audit BPK	Opini audit merupakan suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Rasyid et al., 2022)	Skor Opini Audit 1 = TMP 2 = TW 3 = WDP 4 = WTP (Ditasari & Sudrajat, 2020)

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah serta hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah. Adapun alat statistik dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran pada data yang disajikan. Data penelitian yang terdapat pada penelitian ini meliputi kinerja keuangan, ukuran, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian intern, dan opini audit BPK. Alat statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yakni nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan apabila dapat lolos melalui uji asumsi klasik. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Alat yang dipakai untuk melakukan uji normalitas adalah *Kolgomorov-Smirnov*. Adapun pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti residual dianggap normal
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ berarti residual tidak dianggap normal

2. Uji Auto Korelasi

Alat yang dipakai untuk melakukan uji autokorelasi adalah Durbin – Watson (DW). Pengambilan keputusan terjadi atau tidaknya autokorelasi dapat ditentukan jika nilai $du < dw < 4 - du$ (Ghozali, 2011:110). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas bisa dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleransi serta variance inflation factor (VIF).

Apabila nilai toleransi $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:105).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas.

- a. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji.

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Uji regresi berganda dilakukan dengan mengestimasi variabel dependen (Y) dengan lebih dari satu variabel independen (X).

Berikut merupakan formula yang diterapkan dalam analisis regresi linier berganda: $KKPD = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \epsilon_i$

Keterangan:

KKPD = kinerja keuangan pemerintah daerah

α = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = koefisien regresi variabel independen (*size* pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian internal, opini audit)

X_1 = *Size* pemerintah daerah (variabel independen)

X_2 = Kemakmuran (variabel independen)

X_3 = *Intergovernmental Revenue* (variabel independen)

X_4 = Sistem Pengendalian Internal (variabel independen)

X_5 = Opini Audit BPK (variabel independen)

ϵ_i = koefisien error

3.6.4 Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Uji kelayakan model dengan Uji F dapat dideteksi melalui langkah berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

- $H_0 : \beta_i = 0$, maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- $H_a : \beta_i \neq 0$, maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.

c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh Adjusted R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin mampu variabel independent menjelaskan variabel dependen (Ulfa 2021).

3.6.5 Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis secara parsial melalui Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

- $H_0 : \beta_i = 0$, berarti secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_i \neq 0$, berarti secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau $0,05$, hal tersebut berarti toleransi tingkat

kesalahan adalah 0,05.

c. Penilaian Kriteria Keputusan

- Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) serta Laporan Hasil Pemeriksaan kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 – 2022. Data penelitian diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang berjumlah 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018-2022.

Sampel penelitian sebanyak 14 kabupaten/kota yang diperoleh dengan menggunakan metode sensus sampling. Data berupa pooled data yakni penggabungan *cross section* dan *time series* selama 5 tahun, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 sampel data.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel yang digunakan dalam penelitian, penjelasan kelompok melalui nilai minimum, maksimum, median, rata-rata, serta standar deviasi (Fernandes dan Putri, 2022). Analisis deskriptif pada penelitian ini yaitu mencakup variable kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian intern, serta opini audit yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

		Ukuran Pemerintah Daerah	Kemakmu- ran	<i>Intergovern- mental Revenue</i>	Sistem Pengendali an Intern	Opini Audit BPK	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
N	Valid	70	70	70	70	70	70
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		12,4177	,0910	,7609	10,8000	3,9714	,9994
Median		12,4600	.0800	,7600	10,0000	4,0000	,9700
Std. Deviation		,13793	,04414	.06795	4,60498	,16780	,30604
Minimum		12,12	,04	,64	4,00	3,00	,14
Maximum		12,64	,24	,89	22,00	4,00	1,91

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik pada tabel 4.1 terdapat sebanyak 70 data dengan masing- masing variabel meliputi nilai mean, nilai median, standar deviasi, nilai minimum serta nilai maksimum.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai maksimum sebesar 1,91 yang dicapai oleh Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,14 yang dicapai Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020. Nilai rata- rata sebesar 0,9994 dengan standar deviasi yaitu 0,30604. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata- rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 0,9994 lebih besar dari nilai median yaitu 0,9700 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva kinerja keuangan pemerintah daerah miring ke bagian kanan. Dengan

demikian rata- rata sampel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah dengan nilai maksimum sebesar 12,64 yang dicapai oleh Kabupaten Kapuas pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 12,12 yang dicapai Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018. Nilai rata- rata sebesar 12,4177 dengan standar deviasi yaitu 0,13793. Nilai rata- rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 12,4177 lebih kecil dari nilai median 12,4600 berarti nilai mean terletak dibagian kiri kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva pendapatan asli daerah miring ke bagian kiri. Dengan demikian rata- rata ukuran pemerintah daerah memiliki nilai yang rendah.

Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah kemakmuran dengan nilai maksimum sebesar 0,24 yang dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,04 yang dicapai Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Katingan 2018. Nilai rata- rata sebesar 0,910 dengan standar deviasi yaitu 0,0800. Nilai rata- rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 0,910 lebih besar dari nilai median yaitu 0,0800 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kemakmuran miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata- rata sampel kemakmuran memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X3) dalam penelitian ini adalah *intergovernmental revenue* dengan nilai maksimum sebesar 0,89 yang dicapai oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,64 yang dicapai Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 0,7609 dengan standar deviasi yaitu 0,6795. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 0,7609 lebih besar dari nilai median yaitu 0,7600 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva *intergovernmental revenue* miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel *intergovernmental revenue* memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X4) dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal. Tabel di bawah ini menunjukkan data yang paling sering muncul pada kategori jumlah temuan tertentu, memberikan gambaran mengenai distribusi jumlah kelemahan yang ditemukan pada setiap sampel. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 4.2
Jumlah Temuan Terbesar 5 SPI

Jumlah Temuan	Jumlah Data Dari Sampel	Persentase (%)
17	2	2,9
18	4	5,7
19	1	1,4
21	1	1,4

22	1	1,4
----	---	-----

Tabel diatas menampilkan 5 jumlah temuan terbesar pada variabel independen (X4) yaitu sistem pengendalian internal (SPI) dari hasil analisis yang dilakukan terdapat 2 data dari sampel yang masing-masing memiliki 17 temuan, dengan nilai persentase 2,9% dari total data atas sampel yang diamati. Selanjutnya, terdapat 4 data dari sampel yang masing-masing memiliki 18 temuan, dengan nilai persentase 5,7% dari total data atas sampel yang diamati. Persentase ini lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, menunjukkan bahwa ada lebih banyak wilayah dengan jumlah temuan sedikit lebih banyak. Selanjutnya, masing-masing 1 data dari sampel dengan jumlah temuan 19, 21, dan 22 dengan persentase masing-masing 1,4% dari total data atas sampel yang diamati.

Variabel independen (X5) dalam penelitian ini adalah Opini Audit BPK. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari distribusi opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data dalam tabel ini menggambarkan frekuensi dan kategori opini audit yang diterima oleh setiap sampel yang diaudit, memberikan gambaran mengenai kualitas laporan keuangan mereka. Berikut adalah hasil distribusinya :

Tabel 4.3

Distribusi Opini Audit BPK

Jenis Opini	Jumlah Skor	Jumlah Data Dari Sampel	Persentase (%)
----------------	-------------	----------------------------	-------------------

WTP	4	68	97,1
WDP	3	2	2,9

Berdasarkan tabel diatas variabel independen (X5) yaitu opini audit BPK hanya menampilkan 2 jenis opini yang diberikan kepada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Dua jenis opini yang diberikan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP diberikan kepada 68 data dari sampel dengan total skor 4, yang merupakan 97,1% dari keseluruhan data atas sampel yang diamati. Sementara itu, opini WDP diberikan kepada 2 data dari sampel dengan total skor 3, yang merupakan 2,9% dari total data atas sampel yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data dari sampel mendapatkan opini WTP, sementara hanya sebagian kecil yang mendapatkan opini WDP.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah residual data dalam model regresi linier mengikuti distribusi normal atau tidak. Proses ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0.05 , begitu pun sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0.05 maka distribusi residual data tidak normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov-smirnov.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28509539
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,57
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test dengan total data sampel sebanyak 70 data, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-Watson
1	,579	,335	,283	,16281	2,085

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 2,085. Dimana $2,085(DW) > 1,6281 (dU)$, serta $2,085(DW) < 2,3719 (4-dU)$. Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada 4-du, atau sudah sesuai dengan konsep $dU < DW < 4-dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau bebas autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	Ukuran Pemerintah Daerah	,829	1,206
	Kemakmuran	,499	2,004
	<i>Intergovernmental Revenue</i>	,515	1,943
	Sistem Pengendalian Internal	,851	1,176
	Opini Audit BPK	,893	1,120
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel penelitian ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, sistem pengendalian internal, dan opini audit mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai Varians Inflation Factors (VIF) yang lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel, dengan demikian terbebas dari multikolinearitas.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,727	1,303		,558	,579
	Ukuran Pemerintah Daerah	-,087	,096	-,121	-,907	,368
	Kemakmuran	,420	,388	,186	1,083	,283
	<i>Intergovernmental Revenue</i>	,075	,248	,051	,302	,763
	SPI	8,819E-6	,003	,000	,003	,998
	Opini Audit BPK	,096	,076	,162	1,262	,211
	a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah					

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian internal, dan opini audit BPK memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis hasil yang dipakai adalah regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 5

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	6,275	2,109
Ukuran Pemerintah Daerah	-,532	,156
Kemakmuran	3,258	,629
<i>Intergovernmental Revenue</i>	1,173	,402
SPI	-,002	,005
Opini Audit BPK	,041	,124

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.8 dengan demikian, persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KKPD = 6,275 - 0,532 + 3,258 + 1,173 - 0,002 + 0,041 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (constant) menunjukkan angka 6,275 yang memiliki arti apabila variabel ukuran pemerintah daerah (X_1), kemakmuran (X_2), *intergovernmental revenue* (X_3), system pengendalian internal (X_4) dan

opini audit BPK (X_5) dianggap konstan, maka besarnya variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 6,275.

2. Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $-0,532$ yang memiliki arti apabila ukuran pemerintah daerah (X_1) naik satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $-0,532$.
3. Koefisien regresi kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $3,258$ yang memiliki arti apabila kemakmuran (X_2) naik satu satuan maka akan diikuti penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $3,258$.
4. Koefisien regresi variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $1,173$ yang memiliki arti apabila *intergovernmental revenue* (X_3) naik satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $1,173$.
5. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $-0,002$ yang memiliki arti apabila sistem pengendalian internal (X_4) naik satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $-0,002$.
6. Koefisien regresi variabel opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $0,041$ yang memiliki arti apabila opini audit BPK (X_5) naik satu satuan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar $0,041$.

4.5 Uji Kelayakan Model

4.5.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independent secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,854	5	,171	6,446	,000 ^b
	Residual	1,697	64	,027		
	Total	2,551	69			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada tabel 4.8 nilai F menunjukkan angka 6,446 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian internal, dan opini audit BPK berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,896 ^a	,335	,283	,16281	2,085

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,283 hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, sistem pengendalian internal, opini audit BPK) sebesar 0,283 atau 28,3%. Sedangkan sisanya yaitu 71,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Model	t	Sig.	Kesimpulan
Ukuran Pemerintah Daerah	-3,409	,001	H ₁ : - signifikan (Hipotesis ditolak)
Kemakmuran	5,183	,000	H ₂ : + signifikan (Hipotesis diterima)

<i>Intergovernmental Revenue</i>	2,918	,005	H ₃ : + signifikan (Hipotesis diterima)
Sistem Pengendalian Internal	-,370	,713	H ₄ : - tidak signifikan (Hipotesis ditolak)
Opini Audit BPK	,329	,743	H ₅ : + tidak signifikan (Hipotesis ditolak)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 menyajikan kekuatan hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel ukuran pemerintah daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,532 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -3,049 dan nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak karena t hitung memiliki arah negatif, maknanya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel kemakmuran (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3,258 dengan arah positif dengan t hitung sebesar 5,183 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima,

maknanya kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel *Intergovernmental Revenue* (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,173 memiliki arah positif dengan t hitung sebesar 2,918 dan nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel sistem pengendalian intern (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,002 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -0,370 dan nilai sig sebesar $0,713 > 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak karena nilai signifikan lebih besar dari 5%, artinya sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Opini Audit BPK (X5) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,041 dengan arah positif dengan t hitung sebesar 0,329 dan nilai sig sebesar $0,743 > 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak karena

nilai signifikan lebih besar dari 5%, artinya opini audit BPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, pendapatan antar pemerintah, sistem pengendalian internal, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2018-2022, berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian tersebut:

4.7.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil pengujian, variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Secara teoritis hal ini bertolak belakang dengan teori yang sudah dijelaskan, secara teoritis, ukuran pemerintah daerah dipengaruhi oleh total aset yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa semakin besar total aset suatu daerah, semakin besar pula ukuran pemerintah daerah, yang mengharuskan kinerjanya untuk semakin baik. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat berkontribusi pada kegiatan operasional yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. (Rofiq & Arza, 2021).

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Aafiah Millenia (2022) mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki total aset yang besar, aset tersebut belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara efektif. Dengan kata lain, aset yang dimiliki belum dapat berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik yang memadai di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Sama halnya dengan penelitian Pradana et al., (2022) bahwa “ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena kenaikan atau penurunan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran total asset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia belum dapat berfungsi sebagai mana mestinya”.

Berbeda dengan penelitian Nurhayati & Hamzah (2020), Rofiq & Arza (2021), dan penelitian Akhila (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan teori yang ada.

4.7.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian, variabel kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya hipotesis kedua diterima.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aafiah Millenia (2022) mengenai Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, bahwa Kemakmuran berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD dalam suatu daerah maka tingkat kemakmuran daerah akan semakin tinggi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Kualitas pelayanan publik yang tinggi mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik.

Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan mencukupi kebutuhannya, meskipun tingkat kemandirian yang diperoleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah memang termasuk kedalam kategori sangat rendah akan tetapi hasil tersebut sudah memenuhi realisasi atas target tingkat kemakmuran yang harus dicapai pemerintah daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimana rata-rata pemerintah daerah memiliki target diatas 8%. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Rahmawaty, 2020) yang menunjukkan

bahwa kemakmuran suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah (2018) dan Mega (2019), yang menyimpulkan bahwa kemakmuran daerah tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian ini konsisten dengan teori yang ada, tetapi tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya.

4.7.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian, variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya hipotesis ketiga diterima.

Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Sesoeningtyas M (2012) menyatakan bahwa “Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik.” Dengan hal itu maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mampu menggunakan dana suntikan dari pemerintah pusat, untuk

meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, terutama dalam pendanaan pelayanan publik, yang mencerminkan kinerja keuangan daerah yang baik.

Meskipun tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat cukup tinggi, hal ini tidak selalu menjadi indikator negatif. Sebaliknya, semakin banyak dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tambahan dana ini, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat infrastruktur. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan makmur. Oleh karena itu, meskipun ketergantungan terhadap dana pusat tinggi, peningkatan jumlah dana perimbangan juga dapat berkontribusi secara substansial terhadap perbaikan kinerja keuangan dan keseluruhan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan penelitian menurut Nugroho (2018) hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota mampu menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemda dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka terjadi defisit. Dibutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Semakin besar dana

perimbangan yang diterima akan semakin besar anggaran yang dapat dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian milik Kirana (2020) dan Wismoyo Aji et al, (2020) yang menyatakan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sejalan dengan teori yang ada namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya.

4.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada hipotesis keempat menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi berdasarkan hasil pengujian, variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya hipotesis keempat ditolak.

Ini bertentangan dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah temuan SPI, semakin baik kinerja keuangan daerah, dan sebaliknya, semakin banyak jumlah temuan, semakin buruk kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurarifah et al., (2023) mengenai Pengaruh SPI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dimana hasil temuan SPI sering kali hanya menjadi bahan evaluasi tanpa diikuti dengan implementasi rekomendasi yang memadai. Serta tidak ada tindak lanjut yang efektif terhadap temuan SPI, sehingga menjadikan potensi perbaikan

yang diidentifikasi tidak akan terealisasi, maka dari itu tidak memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa peran jumlah temuan kelemahan SPI dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan tengah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dimana pemerintah belum maksimal dalam mengelola SPI. Sama halnya dengan penelitian Pradana et al., (2022) bahwa “sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan merespons temuan SPI yang menjadikan terhambatnya pelaksanaan perbaikan atas temuan SPI, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan menjadi minim.

Berbeda dengan penelitian Safrida (2017) dan Welly (2021), yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya namun tidak sesuai dengan teori yang ada.

4.7.5 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kelima mengemukakan bahwa opini audit BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel opini audit BPK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kelima ditolak.

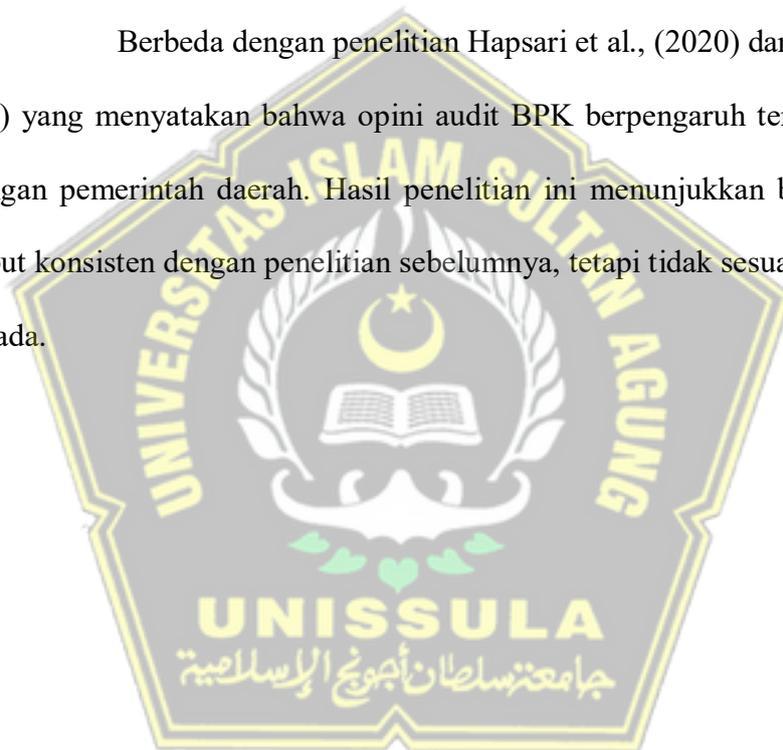
Temuan ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana secara teoritis semakin bagus opini auditnya atau dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian maka semakin terjamin kualitas kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hal tersebut membuat pandangan masyarakat mengenai opini audit jika semakin baik opini dalam laporan keuangan pemda maka semakin baik juga untuk pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan daerah, karena penilaian tersebut dapat dijadikan suatu prestasi bagi daerah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ditasari & Sudrajat, 2020) mengenai Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan opini audit hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apakah laporan tersebut dibuat sewajarnya sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Opini audit BPK sering kali lebih menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur akuntansi daripada menilai efektivitas dan efisiensi operasional yang secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan.

Hal tersebut berarti bahwa BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan audit terhadap pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini lebih memeriksa apakah pemerintah daerah mengikuti aturan akuntansi dengan benar, daripada melihat sejauh mana operasi mereka berjalan dengan efisien dan efektif untuk mendukung kinerja keuangan yang baik

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Utami & Sulardi, 2020) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena opini audit yang diberikan oleh BPK berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya adalah kecukupan pengungkapan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak serta merta tingkat pengungkapan yang tinggi akan memperoleh opini baik begitu pula sebaliknya.

Berbeda dengan penelitian Hapsari et al., (2020) dan Rasyid et al., (2022) yang menyatakan bahwa opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan teori yang ada.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 25 dan analisis hasil seperti yang telah dijelaskan pada bab 4, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesisnya ditolak.
2. Kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis diterima.
3. *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis diterima.
4. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis ditolak.
5. Opini Audit BPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga hipotesis ditolak.

5.2 Keterbatasan

1. Jumlah sampel yang terbatas karena hanya menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018-2022.
2. Pada hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai uji sebesar 0,283 atau 28.3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Sistem

Pengendalian Internal, dan Opini Audit BPK terhadap kinerja keuangan sebesar 28.3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan aset secara lebih efektif dan efisien untuk pengadaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas daerah yang berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja keuangan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan dengan melihat faktor Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Sistem Pengendalian Internal, dan Opini Audit BPK yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan menambah lebih banyak variabel lain serta berbagai aspek lain seperti non keuangan contohnya akuntabilitas, tata kelola yang baik, kompetensi aparatur karena kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait dengan kebijakan dan manusia yang menjalankannya.
3. Memperluas cakupan penelitian dapat melibatkan seluruh wilayah Indonesia atau membandingkan antara provinsi, bahkan antar pulau,

serta memperpanjang periode penelitian lebih dari 5 tahun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kabupaten/kota dalam jangka Panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i1.7428>
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Asnida, N., Irwansyah, I., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213–224. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15210>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Dinah, L. S. dan D. (2023). 40155-91497-1-Sm. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2337–3806), 1–13.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Fassa, M. N. (2018). *KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia)*.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). *PEMATANGSIANTAR Oleh : 2(1)*, 12–17.
- Handayani, N. S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 4(1), 1–12.
- Hapsari, D. W., Telkom, U., Daerah, P. A., Audit, O., & Keuangan, K. (2020). *PENGARUH BELANJA MODAL , PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*,

DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi D . I Yogyakarta Tahun 2013-2018) THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITUR. 7(2), 2743–2750.

- Informasi, S., Dan, A., Modal, B., Kinerja, T., & Daerah, P. (2019). *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan.* 3(2), 147–165.
- Kirana, A. S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(Desember), 175–192.
- Mahmudi, H., Yasin, M., Hakim, L., & Mataram, U. (2019). *EKONOBIS Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap.* 5(2), 1–31.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Nurarifah, R., Afrizal, A., & L, T. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 93–104. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16245>
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Olson, D. L., & Wu, D. D. (2015). The Accounting Perspective. *Enterprise Risk Management*, 31–41. https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003
- Pajak, P., Terhadap, D., Keuangan, K., & Daerah, P. (2012). *Accounting Analysis Journal.* 1(1).
- Pemerintah, B., Aceh, K., Hanum, S., & Zulfiar, E. (2017). *Safrida Hanum, Edi Zulfiar dan Neo Agustina.* 3(November), 86–96.
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>
- Rahma Putri, R. A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>

- Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). *Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 7(April), 1831–1840.
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 10(2), 80–93. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6589>
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 177–186. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1718>
- Tahir, I., Mas'ud, M., & Plyriadi, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Bisnis*, 93(1), 66–74.
- Umum, A., Dana, D. A. N., Khusus, A., Anggaran, T., Kabupaten, B. M., Provinsi, K., & Selatan, S. (2019). *JEMMA | JURNAL OF ECONOMIC*, 2(4), 30–37.
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>
- Wismoyo Aji, M., Mukhibad, H., & Kunci, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 3(1), 97–115. www.jaga.unand.ac.id
- Yulinchton, M. R., Nani, M. B., & Ilmu, N. T. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang Periode 2012-2016). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(juni), 303–314.

<http://eprints.umm.ac.id/38300/>

